



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 14340-14353

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Intelijen Dalam Deteksi Dini Potensi Ancaman Radikalisme Pada Badan Usaha Milik Negara

Bahroji <sup>1✉</sup>, Muhammad Syaroni Roffi<sup>2</sup>

Universitas Indonesia

Email: [ajisetiakarya@gmail.com](mailto:ajisetiakarya@gmail.com) <sup>1✉</sup>

### Abstrak

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah instansi yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian bangsa. Maka keberadaan BUMN tersebut membutuhkan manusia-manusia yang tidak hanya mempunyai keunggulan dalam keahlian namun juga harus memiliki integritas kebangsaan dan nasionalisme kemudian bisa membawa kemajuan BUMN untuk bangsa dan negara. Disinilah persoalan muncul. Di tengah negara fokus dalam pengembangan BUMN, kita dihadapkan pada potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT). AGHT yang paling laten adalah paham radikal (Radikalisme). Radikalisme adalah pandangan dan sikap yang menjustifikasi kekerasan dalam menarasikan kebencian terhadap negara. Orang yang memiliki pandangan radikal, menganggap bahwa negara tidak sesuai dengan imajinasi keyakinannya, sehingga negara dianggap dzolim dan harus diperangi. Negara bagi kaum radikal harus mengikuti apa yang dipikirkannya meskipun menabrak nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Mereka tak mengenal tenggangrasa dan tepasilara alias intoleran. Pandangan yang demikian tersebut bisa mendorong tahapan selanjutnya yang membahayakan bukan hanya pada negara namun juga pada personal yakni terorisme. Radikalisme yang negatif tersebut bisa memproduksi terorisme yang merusak seluruh sendi kebangsaan. Pandangan Radikalisme yang berujung pada terorisme ini telah masuk ke lingkungan BUMN. Maka dibutuhkan peran intelijen, sebagai deteksi dini dan peringatan dini potensi penyebaran radikalisme tersebut. Harapannya, radikalisme tidak boleh masuk ke lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pada gilirannya akan menghambat atau bahkan merusak BUMN itu sendiri. Penelitian ini mencoba menggambarkan potensi ancaman radikalisme di lingkungan BUMN, kemudian langkah deteksi dini dan peringatan dini yang dilakukan oleh manajemen dalam menghadang radikalisme tersebut. Serta upaya yang dilakukan komunitas intelijen di lingkungan BUMN dengan komunitas intelijen lainnya dalam menghadapi radikalisme tersebut.

Kata Kunci: *BUMN, Radikalisme, Humint, Osint Intelijen Strategis, Komunitas Intelijen.*

## Abstract

State Owned Enterprises (BUMN) are agencies that have an important role in supporting the nation's economy. So the existence of these SOEs requires human beings who not only have superiority in expertise but also must have national integrity and nationalism then be able to bring the progress of SOEs for the nation and state. This is where the problem arises. In the midst of a country focusing on the development of SOEs, we are faced with potential Threats, Disruptions, Obstacles and Challenges (AGHT). The most latent AGHT is radicalism (Radicalism). Radicalism is a view and attitude that justifies violence in narrating hatred against the state. People who have radical views, think that the state is not in accordance with the imagination of their beliefs, so the state is considered tyrannical and must be fought. The state for radicals must follow what they think even though it clashes with human and national values. They do not know tolerance and tepasilira alias intolerance. Such a view can encourage the next stage which is dangerous not only to the state but also to individuals, namely terrorism. This negative radicalism can produce terrorism which destroys the whole nation. This view of radicalism that led to terrorism has entered the SOE environment. So the role of intelligence is needed, as early detection and early warning of the potential spread of radicalism. The hope is that radicalism should not enter the environment of State-Owned Enterprises (BUMN), which in turn will hinder or even damage the BUMNs themselves. This research tries to describe the potential threat of radicalism in the BUMN environment, then steps for early detection and early warning carried out by management in dealing with this radicalism. As well as the efforts made by the intelligence community within BUMN and other intelligence communities in dealing with this radicalism.

Kata Kunci: BUMN, Radikalisme, Humint, Osint Intelijen Strategis, Komunitas Intelijen.

## PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan radikalisme menjadi kata yang sering diperbincangkan di khalayak umum. Hal tersebut wajar, mengingat BUMN sebagai institusi negara yang mengendalikan kegiatan ekonomi memiliki peran strategis dalam keberlangsungan dan kemajuan negara. BUMN adalah soko guru ekonomi Indonesia yang tidak hanya bertujuan untuk mengurus kebutuhan hajat masyarakat Indonesia, namun juga membangun sendi-sendi perekonomian bangsa. BUMN adalah garda terdepan perekonomian negara.

Berdasarkan Pasal 1 No. 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara tujuan BUMN dalam Undang-Undang tersebut jelas termaktub diantaranya (1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (2) mengejar keuntungan; (3)

menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia baran dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi; (5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Sumber Badan Pusat Statistik 2021, Saat ini BUMN Menguasai 107 Perusahaan dengan nilai Aset 9.295 Triliun Rupiah. Jumlah yang fantastis yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. Maka tatkala isu radikalisme berhembus kencang dilingkungan BUMN hal tersebut menjadi persoalan yang cukup serius.



Lembaga Riset Alvara Centre dan Mata Air Foundation pernah merilis 9,1% menyebut pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak setuju dengan Pancasila. (IDN Times, 12 Maret 2019,) Jumlah tersebut hampir sama dengan 182.000 pegawai dilingkungan BUMN. Pegawai BUMN yang terpapar tersebut memiliki tingkatan yang berbeda-beda yang berpotensi melahirkan kelompok terorisme yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat Juta Pegawai BUMN terpapar radikalisme.

Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dalam sebuah Rapat Kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI (22 Januari 2022) menyebut, penyusupan paham radikal kepada pegawai BUMN tidak terlepas strategi untuk mendapatkan pengaruh dan dukungan. Jaringan terorisme ini mengincar sumber daya yang dimiliki oleh negara (Tribun News, 25 Januari 2022) . Penyusunan jaringan terorisme umumnya diawali dengan sikap radikal atau pandangan yang salah tentang tafsir agamanya. Dan pandangan radikalisme tersebut umumnya menyerang anak muda yang masih pelajar. Berdasarkan monitoring BNPT, media sosial menjadi transmisi yang efektif dalam mentransfer paham radikalisme.

Boy menguraikan radikalisasi melalui ruang digital menjadi cara baru kelompok teror mencuci otak sasarannya di era kemajuan teknologi hari ini. Tidak sedikit pengguna internet terpengaruh narasi maupun kajian bernada intoleran, yang condong ke arah radikal terorisme. Dampaknya muncul kelompok-kelompok yang eksklusif, maraknya *tren lone-wolf* atau aktor tunggal dalam aksi terorisme, motivasi untuk berangkat ke daerah konflik, dan tindakan merugikan lainnya. Dalam analisisnya, Boy menambahkan, penganut radikal ini umumnya menyampaikan seolah-olah berjuang atas nama agama dan sesuatu yang syahid.

Penyebaran Pandangan radikal tersebut memang tidak berdiri sendiri, namun didasari oleh berbagai latar belakang kondisi sosial ekonomi. Zuly Qadir (2013) dalam Jurnal Maarif mengungkap terdapat beberapa faktor yang memungkinkan munculnya radikalisme di kalangan kaum muda dalam beragama; faktor tersebut adalah: pertama soal mental health. Mengutip *Michael McCullough and Timothy Smith*(2003), dalam *Religion and Health : Depressive Symtoms and Mortality asCase Studies*, melaporkan bahwa kesehatan mental yang ada pada diri kaum muda sebagai posisi yang sangat rentan, sehingga kaum mudagampang mengalami goncangan jiwa(depression) yang disebabkan oleh berbagai faktor dalam hidup.

Ahmad Najib Burhani (2013) menyebut, radikalisme terjadi akibat dari penafsiran teks-teks agama secara literal tanpa melihat konteks historis dan sosiologis sehingga teks-teks tersebut sering kali diklaim untuk melegitimasi tindakan kekerasan. Radikalisme adalah gerakan yang bersifat ideologis yang menginginkan perubahan secara drastis dan menolak sistem pemerintahan dan politik yang sedang berkuasa, namun tidak selalu menggunakan aksi kekerasan dan anarkisme. Makna radikal dalam kajian empiris modern dalam bahasa Inggris telah bergeser diartikan menjadi ekstrem, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra, dan fundamental (Hornby,2000).

Radikalisme telah menjadi ancaman yang berbahaya untuk keutuhan dan keberlangsungan bangsa. Radikalisme telah menjadi potensi ancaman yang bisa merusak keberagaman bangsa dan bahkan memunculkan pertikaian sosial dan horizontal diantara anak bangsa. Potensi radikalisme yang menjurus pada kekerasan bahkan terorisme adalah bentuk ancaman keamanan selain perang (nirmiliter) yang harus menjadi perhatian semua pihak. Salah satu yang berkontribusi terhadap pemikiran tentang keamanan nirmiliter adalah adalan Barry Buzzan (1991).

Dalam bukunya *The Evolution The International Security Studies* Buzzan menyampaikan pasca perang dingin, dimensi keamanan telah berubah. Yang tadinya berpusat pada keamanan negara dimana negara sebagai aktornya dengan kekuatan militer sebagai indikasi utama berubah menjadi konsep keamanan non tradisional. Menurut Buzan, keamanan non tradisional ini tidak hanya membahas soal negara dan militer tapi juga keamanan itu membahas perlindungan individu, kelompok, lingkungan dan bumi itu sendiri. Pemikiran dan tulisan Barry Buzzan bersamatemannya Lenen Hansen (2009) yang tergabung dalam *Copenhagen School* mempengaruhi pemikiran dan konsep keamananan. Poin pemikiran yang penting diantaranya adalah perlunya pengetahuan terhadap sumber-sumber ancaman. Jika bercermin dari konsep Buzzan dan Hansen, jelas radikalisme adalah ancaman selain perang yang memiliki efek fatal terhadap keberlangsungan negara.

Untuk memotret potensi radikalisme sebagai sebuah ancaman ini dibutuhkan tindakan pengetahuan, pengetahuan dengan melalui proses, badan untuk mencari pengetahuan dan sebuah laporan atau uraian dari organisasi tersebut. Itulah yang disebut oleh Hank Prunckun (2010) sebagai intelijen. Intelijen mempunyai serangkaian prosedur atau langkah yang membentuk suatu lingkaran atau siklus. Halini biasa disebut sebagai siklus intelijen (*intelligence cycles*). Dalam siklus intelijen ini, Prunckun menjelaskan bahwa siklus terdiri dari tujuh langkah yang lima langkah awalnya merupakan fokus dari intelijen yaitu : *Direction Setting, Information Collection; Data Collation; Data Manipulation and Processing; and Data Analysis*. Kemudian lima siklus tersebut akan diikuti oleh dua langkah selanjutnya yaitu : *Report writing; and Dissemination to decision makers*.

Produk yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan, proses, integrasi, analisis dan evaluasi serta interpretasi dari bahan keterangan. Berdasarkan UU No.17/2011 tentang Intelijen Negara, Intelijen negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggungan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Peran intelijen untuk deteksi dan peringatan dini dalam identifikasi paham radikalisme di lingkungan BUMN mutlak dilakukan. Ini untuk menghindari ancaman yang lebih berbahaya yakni terorisme sebagai fase lanjutan dari radikalisme. Sesuai dengan Undang-Undang Intelijen No.17 Tahun 2011 Pasal 8 jelas, Penyelenggaraan Intelijen Negara meliputi yaitu Intelijen Dalam Negeri dan Luar Negeri, Penyelenggaraan Intelijen Negara Pertahanan dan/atau militer, penyelenggaraan intelijen negara dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian. Intelijen negara dalam rangka penegakan hukum dan intelijen negara dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian.

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan metode kualitatif, studi kasus. Yin (1996) menyatakan bahwa studi kasus adalah pencarian pengetahuan secara empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupannya nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan dimana multisumber bukti digunakan. Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip.

Penulis menggunakan data primer dari berbagai sumber informasi penting, di lingkungan lembaga BUMN. Data primer itu penulis dapatkan dengan wawancara narasumber yang dinilai mengetahui dan memahami tentang topik yang sedang penulis teliti. Pemilihan narasumber dan responden ini didasarkan pada kompetensi dan pengalaman yang dimiliki, serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban saat ini berkaitan dengan fokus penelitian yang diteliti. Narasumber dibagi ke dalam beberapa bagian yakni Manajemen Perusahaan BUMN yang telah teridentifikasi dan terbukti menjadi tempat lahirnya pelaku radikalisme (terorisme), yaitu PT. Krakatau Steel, PT. Kimia Farma, kemudian Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Datasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror POLRI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komunitas intelijen yang diberikan tanggungjawab serta kewenangan oleh Undang-Undang, diantaranya adalah Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) POLRI, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, narasumber lainnya adalah pengamat, akademisi yang telah intens dan memiliki kapasitas mengenai isu radikalisme dan terorisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### BUMN Medan Baru Radikalisme

Pengamat Intelijen yang juga bekas perekrut kelompok teroris Negara Islam Indonesia (NII) Ken Setiawan mengungkapkan, saat ini kaum radikal dan ekstremis telah merubah gaya dalam mewujudkan cita-citanya. Jika dulu mereka melakukan Tindakan-tindakan anarkis dan cenderung oposisi untuk menekan pemerintah, saat ini mereka telah masuk ke sendi-sendi instrument pemerintah untuk menjalankan "harakahnya" atau pergerakannya. Beberapa organ yang telah tergorganisir ini menyatu dan menjadi bagian dalam pemerintahan yang syah. Mereka masuk lewat partai politik untuk menguasai parlemen, menjadi tenaga atau aparatur sipil negara (ASN) dan juga masuk ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diwawancara Penulis pada 22 Juni 2022 Di Slipi Jakarta, Ken menguraikan bahwa BUMN menjadi sasaran empuk mengingat bekerja di institusi ini sangat menguntungkan untuk doktrinasi ideologi sekaligus juga untuk penggalangan dana.

"Mereka masuk BUMN diawali niat agar bisa menggalang dana sekaligus juga menggalang jamaah. Umumnya mereka professional dengan pengetahuan yang layak dan menduduki posisi strategis,"

Ken juga mengungkapkan dengan posisinya yang strategis dan akses yang mudah terhadap pendanaan membuat organisasi merekomendasikan kepada kadernya agar masuk dan melakukan "da'wah" kepada pegawai BUMN dan ASN. Alasannya dengan menaklukan BUMN dan ASN akan menjadi barometer masyarakat. Adapun metode yang mereka lakukan dalam merekrut pegawai BUMN adalah melalui media sosial, pengajian terbatas dan penggalangan donasi. Mereka yang merespon atau tertarik biasanya terus didekati hingga akhir menjadi kader.

Selama 5 Tahun, sejak 2018-2022, setidaknya ada 5 pegawai BUMN yang terlibat dalam aksi terorisme yang tersebar di beberapa perusahaan besar yakni di PT. Krakatau Steel (KS), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT. Kimia Farma. Jika dibandingkan dengan jumlah pelaku teror sepanjang lima tahun ini, artinya 5 pegawai yang tersebar terbilang kecil jika dibandingkan seluruh jumlah pelaku terror yang mencapai hampir 500 orang selama lima tahun.

Tabel 1: Kasus Terorisme Sejak 2018-2022

## **Aksi Terorisme Selama 5 Tahun**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>19 Kasus</b>	<b>9 Kasus</b>	<b>13 Kasus</b>	<b>6 Kasus</b>	<b>4 Kasus</b>

Namun Kepala Badan Penanggulangan Extremisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Syaukillah mengatakan, persoalan terorisme di sebuah lembaga, misalnya di BUMN tidak bisa dilihat dari kuantifikasi, namun lebih kepada persepsi dan permasalahan yang memang terjadi. Banyak atau tidaknya aksi terorisme bisa diidentifikasi di lembaga tersebut telah tumbuh benih-benih radikalisme. Ketua Jurusan Kajian Terorisme Universitas Indonesia (UI) itu menilai, adanya pelaku terorisme pada lembaga terkait menunjukkan adanya tindakan radikalisme yang harus dibenahi. Karena itulah pentingnya kontra radikal atau pencegahan radikalisme di BUMN. Syaukillah yang ditemui peneliti pada 27 November 2022, menekankan Badan Usaha Milik Negara Agar tidak mengintroduksi penceramah atau da'i yang menyebarkan ujaran atau kritikan yang tidak berdasar bahkan isinya hanya bernuansa diskriminasi dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Hasil Wawancara Peneliti : Kabag Bantuan Operasi (Banops) Densus 88 Antiteror Kombes Pol Aswin Siregar

## **Pegawai BUMN Pelaku Teror**

<b>Tahun</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Pelaku</b>
<b>2018</b>	<b>PT. PLN</b>	<b>1 Orang</b>	<b>AHD</b>
<b>2019</b>	<b>PT. PLN</b>	<b>1 Orang</b>	<b>W</b>
<b>2019</b>	<b>PT. KS</b>	<b>1 Orang</b>	<b>QK</b>
<b>2021</b>	<b>PT. Kimia Farma</b>	<b>1 Orang</b>	<b>S</b>

Dalam pandangan Syaikh, saat ini BUMN belum memiliki *grand design* dalam identifikasi aksi radikalisme dan ekstremisme di lingkungannya. Minimnya wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, sehingga masih ditemukan beberapa BUMN yang memberikan ruang kepada para penda'i yang masih mencaci keberagaman dan kebhinekaan sebagai akar berbangsa.

### Pengawasan Ideologi Pada BUMN

QK, Narapidana Teroris (Napiter) disalah satu BUMN PT. Krakatau Steel, Cilegon. Menurut atasan QK, M. Syarif (General Manager di PT. KS), QK bekerja pada bagian pelayanan umum di Corporate Secretary (Corsec) PT. KS. Posisinya tidak terlalu bawah dan juga bukan top leader. "Posisi QK adalah level menengah yang punya pengaruh ke sekelilingnya. Beliau baik dan sopan, tapi memang tertutup,"

Menurut Syarif dalam interaksi di kantor, QK tidak menunjukkan keanehan. Syarif tidak menduga QK ditangkap Densus AT Mabes POLRI. Rahmat Hidayat, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) yang diwawancara penulis di Kantor PT. Krakatau Steel, merasa kecolongan atas penangkapan QK. Tapi memang pihaknya tidak bisa jauh mengontrol setiap pegawai yang ada di lingkungannya. Pasca penangkapan QK, manajemen telah mulai melakukan kegiatan preventif. Misalnya memonitor setiap penda'i yang ada di lingkungan PT. KS yang berjumlah 55 Mesjid

Manajemen intensif mengawasi 55 forum Dewan Kesejahteraan Mesjid dan melibatkan Badan Nasional dan Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk aktif membantu menekan paham radikalisme. Syarif dan Rahmad mengaku di lingkungan kerjanya telah tumbuh berbagai aliran muslim dan non muslim. Khusus untuk muslim, menurut Rahmad Semua Ormas ada perusahaannya dari mulai NU, Muhammadiyah, LDII, Al Khairiyah, Syiah, dan mereka saling menghormati satu sama lainnya. Namun demikian pihaknya mengaku sulit untuk mendapatkan informasi ketika ada sekelompok orang yang memiliki sikap radikalisme. Di satu sisi, keduanya memahami ancaman radikalisme yang cukup berbahaya dalam keberlangsungan perusahaan. Namun disisi lainnya, ia belum memiliki guide dalam menghalau paham non Pancasila ini.

Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Nurwahid mengungkapkan, akar ekstremisme dan terorisme adalah radikalisme. Radikalisme yang tumbuh di berbagai lembaga itu terdiri dari ekstrem kanan, ekstrem kiri dan ekstrem lainnya. Ekstrem kiri sudah muncul sejak kemerdekaan dan sudah dihabisi oleh order baru Orde Baru dengan adanya UU

Subversi SPPS/11/1963. Saat order baru bangkit, mereka ekstrem kanan memiliki ruang yang bebas sehingga masuk ke berbagai instansi, kampus dan sektor swasta lainnya. Mereka yang tumbuh subur saat ini, yakni ekstrem kanan adalah karena dicabutnya Undang-Undang Subversi 19 Mei 1999.

Perubahan Amandemen dan dicabutnya Undang-Undang Subversif itu telah mendorong perubahan pada bidang ideologi. Muncul komunitas atau kelompok yang membungkus dirinya dengan kemasa agama namun sesungguhnya mereka hanya politisasi agama. Ahmad menyebut menyebutkan misalnya Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang jelas mengusuh ideologi Khilafah yang jelas berseberangan dengan Pancasila. Kelompok-kelompok yang disebut Ahmad Ekstrem Kanan (EKA) ini menurut Ahmad telah mencederai agama Islam yang hanya menonjolkan simbol-simbol ritual namun lemah secara spiritual. EKA menurut Ahmad mengkanalisasi Islam hanya pada urusan Sholat, Zakat Haji dan Zinah. Ironisnya pemahaman EKA ini mengalir ke BUMN lewat ustad-ustad yang memiliki pengetahuan islam yang dangkal. Sementara

#### Radikalisme Mengancam BUMN

Untuk dapat mengetahui seberapa besar kekuatan atau ancaman radikalisme terhadap dapat dianalisis dengan teori ancaman yang dapat dipelajari dari buku berjudul "*Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis*" yang ditulis oleh Hank Prunckun (2010). Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan teori ancaman adalah

$$T (\text{Threat}) = I (\text{Intention}) \times C (\text{Capability}) \times C (\text{Circumstances}).$$

*Intention* atau niat terdiri dari *desire* (keinginan) dan *expectation* (harapan), sedangkan *Capability* atau kapasitas/kemampuan terdiri dari ilmu pengetahuan (*knowledge*) dan sumber daya (*resources*), dikali *Circumstances* yang merupakan kondisi khusus yang berkaitan dengan seseorang atau situasi terkini.

Langkah selanjutnya untuk mengetahui apakah radikalisme benar-benar sebagai ancaman atau tidak adalah dengan menggunakan *fishbone analysis*. Dalam langkah ini, diuraikan unsur-unsur atau data atau keterangan yang berhubungan dengan *desire* dan *expectation*, termasuk diuraikan fakta atau data yang menggambarkan *knowledge* dan *resources* yang dimiliki kelompok radikal. Langkah terakhirnya adalah memberikan skala koefisien ancaman terdiri dari ancaman tersebut berskala dapat diabaikan (*negligible*), minimum, medium, tinggi (*high*) dan serius (*acute*). Skala negligible dengan koefisien 4-6; Skala minimum 7-10; Skala Medium 11-15; Skala tinggi 16-18; dan skala serius (*acute*) 19-20.

## Assessment terhadap Kekuatan Kelompok Radikal

Assessment yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada informasi terbuka (open source) yakni berita media online, wawancara dengan key person atau narasumber yang memiliki kapasitas dan relevansi serta pengetahuan yang banyak kepada kelompok radikal dan BUMN.

Untuk Pengukuran *Intention* (niat) yang terdiri dari *desire* (keinginan) dan *expectation* (harapan), penulis memakai 5 indikator yakni 1. Keinginan untuk melawan pemerintah yang sah. 2. Keinginan untuk menguasai dan mengendalikan sumberdaya BUMN 3. Keinginan Untuk Membenci Pemerintah Sah 4. Keinginan Melawan Konstitusi 5. Keinginan Untuk mendirikan negara sendiri.

NO	Desire & Expectation	Skala 1-5					Jumlah	Remark
		1	2	3	4	5		
	<b>KELOMPOK RADIKAL</b>							
1	Keinginan untuk melawan pemerintah yang sah					5		
2	Keinginan untuk menguasai dan mengendalikan sumberdaya BUMN				4			
3	Keinginan Untuk Membenci Pemerintah Sah				4			
4	Keinginan Melawan Konstitusi			3				
5	Keinginan Untuk mendirikan negara sendiri.			3				
	<i>Jumlah Koefisien Ancaman</i>						<b>18</b>	<b>Tinggi</b>

Untuk Pengukuran *Capability* atau kapasitas/kemampuan terdiri dari ilmu pengetahuan (*knowledge*) dan sumber daya (*resources*), penulis memakai 5 indikator yakni

1. Pemahaman Terhadap Doktrin
2. Memiliki Akses Terhadap Kelompok BUMN
3. Memiliki Jaringan Ke luar BUMN yang kuat
4. Didukung Finansial dan tim yang mapan
5. Mendapatkan Reward dan Apresiasi dari Tim

## KESIMPULAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan usaha yang kepemilikannya sahamnya, sepenuhnya atau sebagian besar dan sebagian kecilnya dimiliki orang negara. Negara memiliki kemampuan untuk mengembalikan saham untuk kepentingan hajat masyarakat banyak. Saat ini dengan Aset hampir Rp.9000 triliun, pendapatan mencapai Rp.2,292 Triliun BUMN bisa meraih margin Rp.124,7 Triliun, menggerakkan lebih dari 1 juta pekerja dan membiaya puluhan Proyek Strategis Nasional yang berdampak pada masyarakat. BUMN menjadi penggerak Ekonomi negara.

Namun demikian di tengah arus pembangunan BUMN yang begitu kuat, dihadapkan pada tantangan dan ancaman yang begitu tak kalah hebat. Terbukti dalam lima tahun ini terdapat setidaknya benih-benih radikalisme muncul di BUMN bahkan terdapat lima pegawai BUMN yang terbukti menjadi narapidana teroris. Dan yang terungkap beberapa riset menyebutkan bahwa beberapa perusahaan terpapar radikalisme sebagai cikal bakal kelompok ekstremis dan teroris. Jika kita potret dengan Teori Pruncun diatas, jelas kelompok radikal ini berada dalam *Intention* dan *capability* skala tinggi sehingga jika situasinya tertentu memberikan peluang mereka betul-betul akan mengendalikan dan menguasai BUMN. Karena itulah membutuhkan keseriusan pemerintah dalam menjaga dan melindungi BUMN, salah satunya adalah dengan melibatkan peran intelijen yang lebih maksimal untuk mendeteksi potensi radikalisme.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aa Kustia. (2007). *Intelijen : Dilema & Tantangan*. Jakarta. CSICI
- Andrew, C., Aldrich, R., & Wark, W. (2009). *Secret Intelligence: A Reader*. London: Routledge.
- Azyumardi Azra, (2016). *Transformasi politik Islam: radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, Jakarta; Prenada Media Group
- Audit Commission (2008) *Preventing Violent Extremism: Learning and Development Exercise. Report to the Home Office and Communities and Local Government*,
- Bagus Takwin, 2016 Dkk- *Studi Tentang Toleransi Dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta; INFID
- Buzan Barry & Hansen, Lene (2009), *The Evolution Internasional Security Studies*, London; Cambridge Press
- Don McDowell. (2009). *Strategic Intelligence; A Handbook For Practitioners, Managers And Users. Maryland; Scarecrow*
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994). *Handbook of Qualitative Research*. London: Cambridge.
- David Kahn, 2009, "An Historical Intelligence Theory". *Intelligence Theory "Key Questions and Debate"*, Ed. Peter Gill, Stephen Murrin, and Mark Phytian, New York, Routledge,
- Esparza, D., & Bruneau, T. C. (2019). Closing the Gap Between Law Enforcement and National Security Intelligence: Comparative Approaches. *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, ISSN: 0885-0607 (Print) 1521-0561 (Online) Journal.
- Gitelman, L. D., Kozhevnikov, M. V., & Chebotareva, G. S. (2021). Strategic Intelligence Of

- An Organization Amid Uncertainty. *Int. J. of Energy Prod. & Mgmt*, Vol. 6, No. 3 (2021) 294–305.
- Hanita, M. (2019). *Pemikiran-pemikiran Stratejik Intelijen*. Jakarta: UI Publishing.
- Hendropriyono, A.M. (2014). *Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia*, Jakarta; Kompas Media Nusantara
- Michael Bazzel. (2018). *Open Source Intelligence Techniques; Resource For Searching And Analyzing Online Information*.
- Kementerian BUMN (BUMN), Kami Bertransformasi, Laporan Tahunan BUMN, Jakarta. Kementerian BUMN
- Kolodziei, E. (2007). *Security and International Relations*. Bucharest: Polirom Publishing House.
- Nachrawi, Gunawan, 2017, *Reinveting BUMN; Pengelolaan BUMN dalam Perspektif Pasal 33 UUD NKRI 1945*, Jakarta; Cendekia Press
- Neuman, W. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Assex: Pearson Education Limited.
- Neumann, S. (2010). *Traditional Security*. Timișoara: Western University.
- Prunckun, H. (2010). *Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis*. Toronto: Scarecrow Press, Inc.
- Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara.
- Sahasad & Chaidar, 2017, *Fundamentalisme, Terorisme dan Radikalisme, Perspektif atas Agama, Masyarakat dan Negara*, Jakarta; Freedom Foundation & CSS-U
- Schroeder, T. L. (1983). *Intelligence Specialist 3 & 2, vol. 1*. Washington DC: Naval Education and Training Program Development Center.
- Usman, W. (2003). *Daya Tahan Bangsa*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Widdowson, D. (2020). Managing customs risk and compliance: an integrated approach. *World Customs Journal*, Volume 14, Number 2. 63-79.
- Yin, R. K. (1996). *Study Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumber Online

<https://www.bnpt.go.id/lawan-radikalisme-di-lingkungan-bumn-boy-rafli-jangan-sampai-pegawai-bumn-terperangkap>  
[Kepala BNPT Berbagi Langkah Praktis Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Perusahaan Swasta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme](#)  
[Detail Dokumen - Panduan Pencegahan Radikalisme : Di Lingkungan Kerja BUMN & Perusahaan Swasta \(bnpt.go.id\)](#)

[Partisipasi Aktif Masyarakat Mendorong Penurunan Indeks Resiko Dan Indeks Potensi Radikalisme Dan Terorisme Tahun 2022 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme \(bnpt.go.id\)](#)

<https://jurnalintelijen.net/2016/07/24/peran-intelkam-polri-dalam-pencegahan-terorisme/>